

ABSTRAK

PENGUATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA MELALUI HARMONISASI REGULASI DIGITAL PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

Evi Fitriani (2410622066), Irsyaf Marsal, Irwan Triadi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik digitalisasi akuntabilitas keuangan negara pada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta merumuskan model penguatan implementasi digitalisasi melalui harmonisasi regulasi. Berdasarkan dua rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana praktik digitalisasi akuntabilitas keuangan negara pada Kementerian Komdigi? Serta Bagaimana penguatan implementasi digitalisasi akuntabilitas keuangan negara melalui harmonisasi regulasi pada Kementerian Komdigi? Penelitian ini dilakukan menggunakan Metode Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan analitis dan konseptual (*analytical and conceptual approach*). Bahan hukum primer terdiri dari UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2004, PP No. 71 Tahun 2010, Perpres No. 95 Tahun 2018, dan UU No. 4 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Dan pada akhirnya penelitian ini menghasilkan, Pertama, praktik digitalisasi akuntabilitas keuangan di Kementerian Komdigi secara teknis telah menunjukkan kemajuan melalui pengembangan aplikasi CACM, SIMWAS, dan prinsip "*no data no budget*" dengan capaian opini WTP serta tingkat penyelesaian rekomendasi BPK sebesar 91,48%. Namun, praktik ini masih menghadapi hambatan struktural akibat ketidakharmonisan regulasi yang bersifat sistemik, meliputi disharmoni vertikal, horizontal, dan temporal. Kedua, penguatan implementasi digitalisasi memerlukan dua model harmonisasi: (a) harmonisasi struktural melalui pembentukan regulasi payung yang mengatur digitalisasi pengelolaan keuangan negara secara terintegrasi dan mencabut pasal-pasal yang bertentangan; dan (b) harmonisasi fungsional melalui Peraturan Menteri Bersama yang mengatur standar interoperabilitas sistem, format data seragam, dan protokol keamanan informasi. Kedua model ini menempatkan kepastian hukum sebagai fondasi akuntabilitas dan memastikan setiap transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.

Kata Kunci: Digitalisasi; Harmonisasi; Akuntabilitas; Regulasi; Komdigi.

ABSTRACT

STRENGTHENING GOVERNMENT FINANCIAL ACCOUNTABILITY THROUGH THE HARMONIZATION OF DIGITAL REGULATIONS AT THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND DIGITAL AFFAIRS

Evi Fitriani (2410622066), Irsyaf Marsal, Irwan Triadi

This study aims to analyze the practice of digitalizing state financial accountability within the Ministry of Communication and Digital affairs (Kementerian Komunikasi dan Digital / Komdigi) and to formulate a reinforcement model for its implementation through regulatory harmonization. Based on two research questions, namely: first, how is the practice of digitalizing state financial accountability implemented at the Ministry of Komdigi? Second, how can the implementation of state financial accountability digitalization be reinforced through regulatory harmonization at the Ministry of Komdigi? This legal research employs a normative legal research method utilizing a statute approach, alongside analytical and conceptual approaches. The primary legal materials consist of Law Number 17 of 2003, Law Number 15 of 2004, Government Regulation Number 71 of 2010, Presidential Regulation Number 95 of 2018, and Law Number 4 of 2023. Secondary legal materials are derived from academic literature, legal journals, and previous research. Data analysis is conducted qualitatively using a descriptive-analytical technique. Ultimately, this study yields two primary conclusions. First, the technical practice of digitalizing financial accountability at the Ministry of Komdigi has demonstrated significant progress through the development of the CACM and SIMWAS applications, as well as the enforcement of the "no data no budget" principle, resulting in an Unqualified Opinion (WTP) and a 91.48% completion rate of Supreme Audit Agency (BPK) recommendations. However, this practice still encounters structural impediments due to systemic regulatory disharmony, encompassing vertical, horizontal, and temporal inconsistencies. Second, reinforcing the implementation of digitalization necessitates two harmonization models: (a) structural harmonization through the enactment of an umbrella regulation (lex generalis) that governs the integrated digitalization of state financial management and repeals conflicting statutory provisions; and (b) functional harmonization through a Joint Ministerial Regulation establishing system interoperability standards, uniform data formats, and information security protocols. Both models establish legal certainty as the cornerstone of accountability and ensure that every electronic transaction holds equal legal force to that of a physical document.

Keywords: Digitalization; Harmonization; Accountability; Regulation; Komdigi.